

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* sebagai akibat market crash pada tahun 1929. *corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 hingga saat ini. Kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agentnya.

Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Dalam rangka economy recovery, Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *good corporate governance* sebagai

tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah 2002). Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan Penyebab krisis ekonomi di Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan GCG di perusahaan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders.

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of inten* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah terapkan di tingkat internasional. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan (Kiswara, 1999; Sutanto, 2000; Gumanti, 2000; Surifah, 2001; Nugraheni & Sulistyanto, 2002; Sulistyanto & Prapti, 2003).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem tata kelola organisasi yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam

konsep ini, pertama pentingnya pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al. 1996). Bila kita hubungkan prinsip GCG dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut : Prinsip kewajaran. Laporan keuangan dikatakan wajar bila memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (Copyright 1996-2004 Suara Merkeka).

Peran akuntan independen (akuntan publik), memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang tertentu.

Dengan prinsip *fairness* ini, paling tidak akuntan berperan membantu pihak *stakeholders* dalam menilai perkembangan suatu perusahaan. Selain itu membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan yang lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yang disajikan harus memiliki daya banding (*comparability*).

Prinsip akuntabilitas, merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif, dengan dibentuknya komite audit. Bapepam mensyaratkan, dalam keanggotaan komite audit, minimum sebanyak 3 orang dan salah satu anggotanya harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan, laporan operasional serta parameter yang digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itu, profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan manajemen dituntut menyediakan informasi jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan akuntan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip ini menghendaki adanya keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya.

Prinsip tanggungjawab berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat. Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Pandangan pemegang saham dan *stakeholder* saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan, tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan pemegang saham, tetapi juga stakeholder lain. Contohnya, kasus PT Inti Indorayon yang pernah ditutup Pemda Sumatera Utara, karena dianggap bermasalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas profesi akuntan merupakan elemen utama dari GCG, sehingga penegakannya tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumberdaya yang dikendalikan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Perusahaan yang berusaha untuk menjaga likuiditasnya tidak berarti bahwa perusahaan tersebut harus menyediakan modal atau sekuritas sebanyak mungkin, sebab bila hal tersebut dilakukan maka berarti perusahaan telah kehilangan kesempatan untuk memperbesar laba. Berbeda halnya jika modal yang tersedia di komposisikan menurut kebutuhan perusahaan, maka modal yang ada bisa dimanfaatkan untuk investasi atau memperluas usaha sehingga nantinya akan memperbesar laba.

Selain likuiditas kreditor juga menaruh perhatian pada kinerja keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang disebut solvabilitas dan profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dapat pula dikatakan sebagai rentabilitas namun kemampuan dalam memperoleh laba hanya didasarkan pada modal sendiri, sedangkan profitabilitas mencakup keseluruhan dari kekayaan

perusahaan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sangat penting bagi perusahaan untuk dapat menilai kinerja perusahaan melalui penganalisaan atas laporan keuangannya.

Hal lain yang berhubungan dengan kredibilitas pelaporan keuangan dan peningkatan kepercayaan investor maupun pemegang saham yaitu mengenai *Good Corporate Governance* yang merupakan suatu upaya pengembangan yang ditujukan untuk optimalisasi sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik perusahaan terjaga, hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. *Good Corporate Governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, peneliti melihat bahwa sangat pentingnya *Good Corporate Governace* didalam perusahaan yang dapat melindungi pemegang saham dan dipercaya para investor. Sehingga nantinya akan mengurangi banyak kasus-kasus rekayasa keuangan, korupsi dan sebagainya.

1.2.Rumusan Masalah

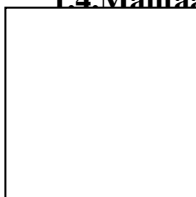
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini, masalah yang ingin diteliti adalah tentang penerapan Good Corporate Governance. Pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran KAP, komite audit independent dan proporsi dewan komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance dalam hal ini ukuran KAP, keberadaan komite audit independent dan proporsi dewan komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

1.4.Manfaat Penelitian



ini diharapkan dapat memberikan manfaat : (1).Bagi perusahaan, penelitian memberikan masukan kepada perusahaan tentang peran GCG terhadap kinerja keuangan. (2).Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu sehubungan dengan manfaat penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dalam penyajian laporan keuangan (3).Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan tentang *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan.